

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis rangkap jabatan kepala daerah dalam KONI. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah tindakan rangkap jabatan kepala daerah dalam organisasi olahraga yaitu KONI ini dilarang atau tidak.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan dua pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang berkaitan dengan masalah rangkap jabatan kepala daerah dalam KONI.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jabatan kepala daerah dalam organisasi olahraga merupakan rangkap jabatan dikarenakan kepala daerah memiliki jabatan lain diluar jabatan utamanya sebagai kepala daerah selain itu dua jabatan tersebut sama-sama bersumber dari APBN dan APBD. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 menjelaskan adanya larangan rangkap jabatan pejabat publik dalam organisasi olahraga namun sampai saat ini masih banyak pejabat publik yang memiliki jabatan di dalam kepengurusan organisasi olahraga yaitu KONI. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengawasan dari pemerintah pusat dan adanya konflik kepentingan serta minimnya etika yang dimiliki oleh para pejabat.
Kata Kunci : Rangkap jabatan, kepala daerah, organisasi olahraga

ABSTRACT

This research aims to know and analyze the position of regional head in KONI. This research also aims to know and analyze whether the double action of regional head in the sport organization namely KONI is forbidden or not.

The writing of this thesis uses normative legal research methods with two research approaches, namely, the approach of legislation and case approach related to the problem of double head of regional office in KONI.

The results of this research show that the position of regional head in the sports organization is a double position because the regional head has another position outside its main Jabatan as regional head. Article 40 Law No. 3 of 2005 explains the prohibition of double-office public officials in sports organizations but until now still many public officials who have offices in the management of sports organizations namely KONI. This is due to lack of supervision from the central government and the conflict of interest and lack of ethics owned by the officials.

Keywords: Double job title, regional head, sports organization